

Pemetaan Wacana Teoritis Kajian ASEAN

Syahrul Salam & Musa Maliki
(Dosen Tetap Prodi HI FISIP UPN "Veteran" Jakarta)

Abstract

This research is descriptive analytic which focus study on ASEAN alaysis in varian theme and perspectives. The data of this study is obtained by deeply analysis toward journal and book references. By this method, this research is also called as library research. The result of the study found that at least there are six perspectives on ASEAN studies: critical realism, electick: contructivism and rationalism, liberal institutional, neo-realism, realism and liberal perspektives. Some writers contribute toward the ASEAN themes: Cornelia Beyer, Hino Katsumata, Mark Beeson, David & Smith, Termsak Chalermpananupap, CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, dan Donald E. Weatherbee.

Key Words: ASEAN, Pemikir, Perspective,

Pendahuluan

Kebenaran tentang ASEAN secara perspektif (basis epistemologi) memberikan keingintahuan tentang peta pemikiran seseorang intelektual terhadap obyek kajian ASEAN dan proses reproduksinya. ASEAN sebagai sebuah proses regionalism dihadirkan sebagai suatu obyek kajian, karena ada perspektif yang membenarkan. Sebaliknya, jika tidak ada perspektif yang mendefinisikan atau mendekatinya, maka ASEAN sebagai suatu fenomena dianggap tidak ada.

Perspektif fungsionalisme menghadirkan ASEAN sebagai suatu institusi yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN dalam rangka menciptakan perdamaian. Neo fungsionalisme menamai fenomena ASEAN sebagai institusi regional yang membuat negara-negara Asia Tenggara mempunyai ikatan untuk melenggangkan perdamaian di wilayah tersebut. Perspektif konstruktivisme menghasilkan ASEAN sebagai suatu identitas dan norma negara-negara Asia Tenggara bersama imajinasi idea tentang kerjasama dan perdamaian.

Perspektif realis yang direpresentasikan Barry Buzan mengkaji ASEAN sebagai sebuah sub-ordinat dari system internasional. Sehingga teori yang diusung oleh Buzan akan menempatkan

ASEAN tidak sebagai institusi otonom, karena ASEAN akan selalu bersentuhan dengan pusaran system internasional, maupun penetrasi yang dilakukan oleh kekuatan di luar kawasan Asia Tenggara (external regional power).

Di atas adalah beberapa perspektif yang beragam tentang keberadaan ASEAN. Pemetaan lebih detail tentang reproduksi tiap perspektif dalam merepresentasikan ASEAN menjadi signifikan, sebab kita dapat melihat proses suatu pengetahuan (perspektif) dibuat dalam rangka penguasaan tentang obyek kajian, yakni ASEAN.

Barang siapa yang menamai dan memproduksi paket pengetahuan dalam suatu pendekatan dan perspektif tertentu, maka dia menguasai ASEAN. Dengan kata lain, pengetahuan adalah sumber kekuasaan dalam mengontrol batasan tentang ASEAN dan bukan ASEAN. Berangkat dari hal ini, maka penelitian ini dirancang untuk memetakan reproduksi perspektif dalam melihat ASEAN. Hal ini akan memunculkan perspektif mana yang akan timbul dan tenggelam, yang dibenarkan dan yang disalahkan, yang terpinggirkan dan yang mainstream. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah pemetaan yang detail tentang konstruksi perspektif.

Dalam memetakan wacana teoritis studi ASEAN, maka konsep wacana menjadi sangat signifikan sebagai kerangka asumsi teoritis ASEAN yang dipaparkan dalam bentuk pengelompokan-pengelompokan. Merujuk pada Danaher-Schirato-Webb, wacana dibahasakan dalam konsep discourse. Menurut mereka, wacana adalah bentuk bahasa yang dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dan ide-ide yang memiliki nilai-nilai dasarnya. Wacana dipakai dalam menggambarkan pernyataan-pernyataan dan ide-ide dalam memahami dunia atau dalam melihat segala sesuatu yang ada di dunia.

Wacana individu ini diterjemahkan sebagai ungkapan asumsi-asumsi teoritis akademisi hubungan internasional dan Asian Studies dalam mendefinisikan, memaknai, mengetahui fenomena kajian ASEAN. Dengan kata lain tipe klaim-klaim kebenarannya dalam teks bahasa yang diungkapkan mengekspresikan nilai-nilai kebenaran tentang ASEAN. Gambaran aksi para sarjana ditentukan oleh struktur bahasa yang lebur bersama penguasaan mereka terhadap ASEAN. Singkatnya, asumsi teoritis mereka menjadikan mereka mempunyai kekuasaan dalam menjelaskan kebenaran fenomena ASEAN.

Mills mengatakan bahwa diskursus merupakan sesuatu yang tidak rasional, karena penguasaan sarjana hubungan internasional dan Asian Studies terhadap fenomena ASEAN tidak menjelaskan secara sadar batas subyek pengetahuan mereka dengan keterbatasan struktur pengetahuan yang dimilikinya. Secara singkat, subyek pengetahuan mereka justru ditentukan oleh struktur bahasa yang mereka utarakan (Mills, 1997). Jadi analisis wacana berkaitan dengan jarak linguistik dengan non-linguistik material seperti pidato, laporan, manifestasi, peristiwa sejarah, kebijakan, ide-ide, dan institusi. Semua hal ini ditentukan dan terbatas dalam teks (Howarth, 2000).

Tinjauan Pustaka

Analisis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan perspektif dari para intelektual yang peduli pada tema/isu ASEAN. Para intelektual ini mereproduksi/membentuk pengetahuan tentang keberadaan ASEAN. Intelektual-intelektual yang merepresentasikan tentang keberadaan ASEAN, diantaranya: Donald McCloud. McCloud mempunyai perspektif bahwa ASEAN ditentukan oleh kontelasi system internasional. Kebijakan politik luar negeri negara-negara Asia Tenggara ditentukan oleh system internasional yang anarki. Anarki ini menghasilkan struktur internasional yang ditempati oleh negara yang berkapabilitas power paling besar (McCloud, 1995).

Intelektual Mel Gurtov dan A. G. Marsat mempunyai perspektif bahwa negara-negara Asia Tenggara selalu dibawah kendali system balance of power. Oleh sebab itu, ASEAN adalah organisasi lemah perannya dalam menciptakan keamanan regional karena yang menjaga keamanan regional Asia Tenggara adalah negara yang secara sistemik mempunyai kapabilitas power besar – dalam konteks Perang Dingin, politik – keamanan regional Asia Tenggara (ASEAN) ditentukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet (Gurtov, 1974).

Intelektual Inggris, Barry Buzan yang melihat ASEAN adalah negara-negara di Asia Tenggara (“Southeast Asian Security Complex) yang terbagi menjadi dua kelompok: kubu Komunis-Soviet (Vietnam, Laos, Kamboja); dan kubu Kapitalis-Amerika Serikat (Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Brunai). Buzan menamai hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara dengan “local pattern of security relations” yang didominasi pengaruhnya oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan China (Buzan, 1988).

Sementara itu, Edy Prasetyono mengikuti

kerangka pengetahuan Barry Buzan. Perbedaan keduanya adalah Buzan menganalisis kompleks keamanan Asia Tenggara pada saat Perang Dingin yang menempatkan ASEAN cukup aman karena berada di bawah kawalan Bipolar Uni Soviet – Amerika Serikat, sedangkan Prasetyono menganalisis kompleksitas keamanan Asia Tenggara pada saat Pasca Perang Dingin yang menempatkan ASEAN dalam sistem multipolar Amerika Serikat, Jepang, Cina dan India (Prasetyono, 2007).

Intelektual Cina, Yuen Foong Khong mengajukan argument bahwa ASEAN pasca Perang Dingin berdasarkan pada ASEAN-based dan ASEAN-dominated. Analisis Khong ini berawal dari analisis evolusi hubungan keamanan lima negara-negara ASEAN yang pertama (Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand). Khong mengadopsi pandangan Karl Deutsch untuk mengembangkan ASEAN dalam wadah "pluralistic security community". Istilah ini mengacu kepada "a group of states whose members share dependable expectations of peaceful change in their mutual relations and rule out the uses of force as a means of problem solving". Hal ini melandasi prinsip penyelesaian masalah tanpa menggunakan kekerasan. Khong berusaha menjelaskan jejak evolusi identitas bersama (common identity) atau "we-feeling". Agar mudah menjelaskannya, Khong membagi tahapan evolusi ASEAN menjadi empat: sebelum 1967, 1967-1976, 1976-1989, 1989-sekarang (Khong, 1997).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengkategorikan pemikiran hubungan internasional berdasarkan perspektif, waktu dan analisisnya tentang ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan menghubungkan dua variable atau lebih, tetapi fokus pada satu

variable yang digambarkan secara mendalam dan detail tentang sedalam apa para intelektual menganalisis kajian ASEAN.

Lebih lanjut, metode pustaka diantaranya data yang akan diambil sifatnya kualitatif dari sumber-sumber buku teks dan artikel para pemikir HI tentang ASEAN. Data primer adalah sumber teks asli dari penulis langsung tentang ASEAN yang direview dan dianalisis. Data sekunder adalah sumber informasi yang diterima dari sumber-sumber secara tidak langsung untuk membantu memperkuat analisis penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Termsak Chalermphanupap

Pandangan Termsak diungkap dalam studinya yang berjudul "Life in ASEAN After The Entry Into Force of The ASEAN Charter". Menurut Termsak, bahwa ASEAN Charter akan mengubah ASEAN dalam empat hal penting yakni; demokrasi, kerjasama dalam hak asasi manusia, organisasi yang berbasis pada aturan main yang lebih jelas dan pada struktur organisasi (Chalermphanupap, 2010).

Dalam konteks demokrasi, ASEAN Charter memberikan pengaruh atau dampak dalam berbagai sistem politik anggotanya. Adanya varian system politik seperti Laos dan Vietnam yang berhaluan komunis, kemudian Myanmar dengan pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer dan Brunei Darussalam yang bercorak kesultanan ditambah lagi dengan berbagai corak dan model parlemen dan praktek demokrasi di dalamnya membuat ASEAN jauh lebih "complicated".

Boleh jadi munculnya perbedaan dalam system politik negara-negara ASEAN, namun dalam konteks organisasi ke-ASEAN-an, praktek berdemokrasi tetap ditegakkan. Ini dapat dilihat dari sudut pandang bahwa kerjasama regional ASEAN sejauh ini dapat ditingkatkan termasuk



dalam hal pembangunan dan upaya penciptaan demokratisasi.

Selanjutnya, Termsak banyak menyoroti praktek penegak HAM di ASEAN. Bagi Termsak, keseriusan ASEAN dalam penegakan HAM di satu sisi adalah keharusan, namun di sisi lain adalah dilemma. Jika mengacu kepada kedudukan ASEAN sebagai organisasi, sangat terlihat bahwa penamaan “ ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Right” merupakan pilihan nama yang penuh kompromi. Ada azas kehati-hatian dalam pelabelan nama terkait dengan organ penegakan HAM di internal ASEAN. Penyebutan nama ini merupakan hasil kompromi interen ASEAN dengan dua pilihan yakni penggunaan istilah “body” atau kah “commission”

Kerjasama dalam penegakan HAM merupakan sesuatu yang krusial di internal ASEAN. Salah satu dilema yang dihadapi oleh badan HAM ASEAN adalah bagaimama menciptakan ruang rekonsialiasi antara realitas politik anggotanya dengan kewajiban regional untuk mempromosikan penegakan HAM. Mengingat beragamnya model dan varian sistem politik anggotanya, menurut Termsak, hal yang paling memungkinkan bagi ASEAN adalah terlebih dahulu menciptakan situasi nyaman bagi anggotanya, tanpa tersinggung dengan “isu” HAM. Oleh karena itu, langkah kongrit yang dilakukan adalah secara gradual membangun dan menciptakan model kerjasama penegakan HAM dengan tetap menjaga “trust” diantara negara anggota.

Dalam poin yang ketiga, Termsak menyorot mengenai “Rule-based ASEAN”. Negara-negara anggota ASEAN mesti menyadari bahwa secara natural ASEAN sesungguhnya telah memiliki apa yang disebut dengan “The ASEAN Way”. Negara anggota ASEAN dalam pergaulan regionalnya tetap mengutamakan prinsip-prinsip yang selama

ini sangat kental dalam praktek sesama anggota. Begitupun dalam konteks penerapan ASEAN Charter. Setidaknya ada enam poin yang diharapkan juga terus dapat dibangun dalam konteks ASEAN Charter yakni; Penghormatan terhadap muatan Charter serta berbagai prinsip yang ada di dalamnya, mematuhi semua kewajiban keanggotaan termasuk menelaraskan berbagai aturan domestik dengan kerangka kerja ASEAN yang tertuang dalam perjanjian ASEAN, negara-negara anggota ASEAN bersedia mematuhi dan mengimplementasikan berbagai persetujuan dan instrumen legal lainnya, bersedia untuk aktif berpartisipasi dengan kesadaran penuh untuk bersedia bekerjasama, bersedia untuk lebih terbuka dan bersahabat dalam rangka menyelesaikan potensi konflik yang mungkin saja lahir akibat berbagai perjanjian dalam ASEAN termasuk implikasi daripada ASEAN Charter, dan yang terakhir adalah negara-negara anggota ASEAN diharapkan untuk lebih “sportif” dalam mematuhi berbagai putusan yang dilahirkan dari lembaga yang diberi mandat dalam penyelesaian “despute” antar sesama anggota..

Sebagai poin keempat yang diungkapkan Termsak adalah terkait dengan “Institutional Build-up”. Menurutnya, disamping ASEAN Charter menyinggung mengenai lembaga HAM ASEAN, ia juga menyoroti pembentukan lembaga atau beberapa mekanisme baru dalam ASEAN seperti misalnya; ASEAN Coordinating Council yang merupakan forum representatif yang “dihuni” atau dihadiri oleh para menteri luar negeri di lingkungan ASEAN, selain itu, ada juga An ASEAN Community Council. (ACC). ACC ini kepentingannya untuk menjembatani tiga entitas utama ASEAN yaitu; ASEAN Political Security Community Council (APSC), ASEAN Economic Community Council (AEC) dan ASEAN Socio Cultural Community Council (ASCC). Selanjutnya dalam konteks

penguatan institusi ASEAN juga perlu menetapkan apa yang disebut dengan Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR).

B. Pemikiran C. P. F. Luhulima

Salah satu peneliti yang juga konsern dengan masalah ASEAN adalah C. P. F. Luhulima. Dalam bukunya yang mengambil tema sentral “Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015” menyorot tiga sisi penting ASEAN; Ekonomi, politik dan keamanan. Inilah tiga rangkuman pandangan yang relatif komprehensif (Luhulima, 2011).

Bidang Ekonomi

Menurut Luhulima, setidaknya ada lima bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam lingkup ekonomi yakni, pelembagaan ASEAN + 3 (APT) dan mekanisme kerjasama di dalamnya. Kemudian peluang dan tantangan kerjasama ASEAN di bidang pembangunan sosial, ketiga dampak negatif perdagangan bebas bagi negara berkembang, selanjutnya tanggapan Luhulima terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan yang kelima adalah pencapaian ASEAN Economic Community, dengan titik tekan pada kekuatan dan kelemahan.

ASEAN plus three menurut Luhulima harus tetap mempertahankan keterbukaannya dan siap untuk membuka hubungan dengan berbagai organisasi regional lain maupun dengan negara-negara di sekitar Asia Timur.

Dengan kondisi yang lebih terbuka, ASEAN diharapkan mampu bergerak pada level yang lebih luas, dari Bilateral Swap Arrangements menjadi Bilateral trading arrangements dengan melibatkan Taiwan, Australia dan Selandia Baru dalam suatu bangunan ekonomi yang kokoh di Asia Timur. Hal ini untuk mengimbangi berbagai dinamika perbedaan yang kerap kali ditunjukkan oleh China

dan Jepang.

Di dalam APT, ASEAN diharapkan menjadi penggerak utama. ASEAN harus dapat pula mencari penyesuaian antara ASEAN Free Trade Area dengan bilateral trading arrangements yang dikehendeki China dan Jepang. Lebih lanjut menurut Luhulima, ASEAN masih harus berfikir matang dalam menanggapi tawaran Korea Selatan dalam konteks East Asia Grouping, karena dikhawatirkan Korea akan mengambil alih kepemimpinan organisasi ini. Termasuk usul Korea lainnya yakni East Asia Free Trade Area dan pembentukan East Asia Organisation for Cooperation and Development (East Asia OCD) yang lebih menyuarakan Asia Timur di dunia menurut Luhulima masih terlalu dini untuk disuarakan.

Selanjutnya Luhulima menyinggung mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan gender mainstreaming dan health mainstreaming yakni usaha untuk membangun ASEAN yang secara ilmiah dan teknologi kompetitif di dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan diharapkan akan tercipta suatu knowledge workforce di ASEAN dengan jumlah yang mumpuni.

Sementara itu, terkait dengan sindiran Luhulima mengenai dampak negatif perdagangan bebas bagi negara berkembang juga menarik untuk dicermati. Menurutnya, campur tangan negara dalam pengembangan perdagangan bebas, dalam berorientasi kepada pasar luar negeri tidak perlu dikategorikan sebagai merkantilisme, sebagai “beggar-thy-neighbour policy”, melainkan sebagai menafestasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas dalam konteks ini harus diartikan sebagai perdagangan yang berorientasi ke pasar luar negeri, bukan bebas murni, karena pasar yang bebas murni itu tidak ada. Di negara manapun di dunia menurut Luhulima, pasti melakukan intervensi dalam

perdagangan luar negeri, baik ekspor ataupun impor. Hanya saja yang membedakan adalah kadar campur tangan yang dilakukan tiap-tiap negara. Apa yang dilakukan oleh Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dalam isu pertanian merupakan bentuk intervensi..

Poin kedua yang disinggung Luhulima dalam bukunya *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015* adalah bidang politik. Luhulima menyinggung mengenai unsur dasar pembentukan ASEAN. Harus diakui bahwa momentum Bali Concord I dan Bali Concord II sesungguhnya fakta sejarah yang menjadi pijakan awal pembentukan ASEAN. Fokus ASEAN dalam tiga hal utama yakni MKA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN merupakan unsur dasar pembentukan ASEAN.

Pada poin ketiga dari karangan Luhulima menyebutkan mengenai dinamika dalam bidang keamanan. Ada beberapa poin inti yang dituangkan dalam bagian ini yaitu bagaimana dinamika regionalism pertahanan di Asia Tenggara. Selain itu, singgungannya mengenai pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional dalam pembangunan keamanan Asia Tenggara juga patut dicermati. Disamping poin di atas, Luhulima menyindir proses pengembangan diplomasi preventif dan ASEAN Regional Forum serta peran strategis Indonesia dan ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang terakhir dalam singgungannya adalah menyorot dimensi keamanan Selat Malaka dan posisi Singapura.

C. Pemikiran Dewi Fortuna Anwar

Dalam penelitiannya yang berjudul “Menjelang ASEAN Security Community 2015, Dari State Oriented Menuju People Oriented”, menyinggung beberapa poin penting terkait

perjalan ASEAN setelah 40 tahun pembentukannya (Fortuna Anwar, 2007).

Konsep ASEAN Security Community (ASC) merupakan salah satu tonggak daripada ASEAN community yang memuat prinsip-prinsip yang tidak saja dimaksudkan untuk membangun budaya hubungan damai diantara negara-negara ASEAN tetapi juga mendorong terciptanya situasi yang stabil dan damai di dalam negeri masing-masing.

Dalam pandangannya bahwa konsep security sesungguhnya dimaksudkan untuk membatasi dan mencegah konflik atau kekerasan baik dalam hubungan antar negara maupun di dalam negeri para anggota yang terikat dalam security community.

Dalam konteks ASEAN, diketahui ada 2 poin penting dalam kerangka ASEAN Security Community: khususnya menegaskan identitas keamanan ASEAN;

Pertama, ASC ditujukan untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ketingkat yang lebih tinggi guna menjamin agar negara-negara di kawasan ini hidup dengan damai satu sama lainnya dan dengan dunia luar dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Anggota ASC semata-mata akan mengandalkan pada proses damai dalam menyelesaikan pertikaian intra regional, serta memandang keamanan mereka sebagai terkait satu sama lain secara fundamental dan diikat oleh lokasi geografis, visi dan tujuan yang sama.

Kedua, ASC sementara mengakui hak berdaulat setiap negara anggota untuk mengikuti kebijakan luar negeri dan pengaturan pertahanan masing-masing dan memperhatikan saling keterkaitan antar realitas politik, ekonomi dan social, mengedepankan prinsip keamanan komprehensif yang memiliki aspek politik, ekonomi, social dan

keamanan yang luas dengan ASEAN Vision 2020 daripada suatu pakta pertahanan, aliansi militer atau kebijakan luar negeri bersama.

Dari kedua poin diatas jika dicermati maka diketahui bahwa prinsip-prinsip mengenai kedaulatan negara, non intervensi, pembuatan keputusan melalui consensus dan penyelesaian konflik secara damai tetap menjadi ciri utama ASC.

Dalam perjalanan sejarah ASEAN, diketahui basis orientasinya kepada urusan negara (state oriented), sangat eksklusif. Dinamika ini dianggap mengasingkan ASEAN secara instusi dengan warga ASEAN (people oriented).

Pertanyaan yang menarik menurut Fortuna Anwar adalah apakah setelah penandatanganan piagam ASEAN 2007, ASEAN telah bergeser dari state oriented menuju people oriented?

Bagi Fortuna Anwar, posisi ini masih belum jelas. Di satu sisi Piagam ASEAN berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan pemerintahan dan sistem hukum yang bersih, mempromosikan dan melindungi HAM, yang sesungguhnya ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat dan pro keamanan insani. Namun disisi lain menurut Fortuna Anwar, Piagam ASEAN juga secara eksplisit menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip “suci “ ASEAN, seperti tidak mencampuri urusan dalam negari masing-masing, pembuatan kebijakan berdasarkan konsensus dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota.

Bagi Fortuna Anwar, kelemahan mendasar daripada ASEAN hari ini adalah tiadanya kekuatan pemaksa supranasional yang relatif otonom, yang dapat mengeluarkan keputusan yang harus diikuti oleh anggotanya. Dengan demikian organisasi ASEAN tak lebih dari sekedar organisai

“intergovernmental” bukan supranasional.

D. Pemikiran Donald E Weatherbee

Secara singkat, Watherbee lebih melihat dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Menurutnya ada delapan poin penting dalam dinamika hubungan intrnasional di ASEAN yakni, aneka ragam aktor yang terlibat di ASEAN seperti aktor negara di tingkat regional, kemudian extraregional state actor dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan non state actors. Ketiga aktor ini secara aktif memainkan peran dalam dinamika hubungan ASEAN (Weatherbee, 2009).

Selain menyinggung aktor yang terlibat di ASEAN, Weatherbe juga menggambarkan situasi dan keberadaan ASEAN pada saat Perang Dingin. Menurutnya ada empat situasi perang Dingin di Asia Tenggara yakni, masa penghadangan, pada saat perang Indochina 1961-1975 termasuk perang atau konflik internal dalam kurun waktu 1975-1978, dan fase ketiga perang Indochina dan pengakhiran Perang Dingin.

Weatherbee juga menambahkan temuannya terkait dengan regionalisme di ASEAN. Ada empat poin yang disinggung Weatherbee dalam dinamika regionalisme di ASEAN yakni posisi dan dinamika ASEAN memasuki lima puluh tahun usianya, serta bagaimana evolusi ASEAN didalamnya. Disamping itu ia juga menyindir dinamika hubungan eksternal di ASEAN dan beberapa model kerangka kerjasama multilateral yang bersifat subregional.

Selain tema di atas, Weatherbee juga menyorot mengenai konflik dan resolusi konflik di Asia Tenggara. Menurutnya, dalam mekanisme penyelesaian konflik di kawasan ini, negara-negara ASEAN telah memiliki tradisi baku yang dikenal dengan “The ASEAN way”. The ASEAN way ini mengacu kepada 12 prinsip yang tertuang dalam ASEAN Security Community. Selain itu,



dalam sejarahnya, ASEAN juga menghadapi dua jenis kejahatan transnasional yakni terorisme dan kejahatan transnasional.

Rangkuman lain Weatherbee adalah terkait dengan Asia Tenggara dan ekonomi internasionalnya. Ia menggarisbawahi mengenai tentang AFTA dan berbagai bentuk model kerjasama perdagangan dan investasi di ASEAN.

E. Cornelia Beyer

Pemikiran Beyer tentang ASEAN dikaitkan dengan faktor eksternal, yakni penanganan terhadap terorisme (war on terror). Selain itu, Beyer menampilkan Uni Eropa sebagai komparasi politik. Pasca 9/11, Beyer berusaha membantah bahwa institusi ASEAN dan Uni Eropa dipaksa oleh Amerika untuk mengikuti program mereka. Menurutnya, ada faktor ekonomi dan persamaan budaya yang ASEAN, Uni Eropa, dan Amerika bekerjasama.

Oleh sebab itu, pendekatan realisme, liberalisme, dan konstruktivisme tidak cocok menganalisa konteks penanganan ASEAN terhadap terorisme. Beyer menggunakan realisme kritis (critical realism) dengan asumsi dasar peran Amerika terhadap ASEAN dan Uni Eropa tidak hanya di wilayah material, tetapi juga non material. Dari perspektif ini, Beyer menggunakan konsep hegemonic governance di kawasan. Amerika mempunyai peran hegemonic governance di ASEAN dan Uni Eropa, karena relativitas power ketiganya, daya dorong untuk bekerjasama, interdependensi asimetris, pengaruh-pengaruh diskursif, otoritas dan legitimasi. Oleh sebab itu, Amerika tidak serta merta menggunakan kekuatan militernya untuk memaksa kedua institusi itu untuk bersama-sama melawan terorisme.

ASEAN secara diskursif memang masih melihat Amerika sebagai penopang ekonomi

internasional, karena dolar masih menjadi tumpuan satu-satunya dunia. Faktor kepercayaan masyarakat internasional terhadap dolar dan ekonomi Amerika memang sulit untuk digeser, kecuali ada faktor X yang tiba-tiba masyarakat internasional berpaling ke Yen atau Yuan, misalnya. ASEAN juga memang secara suka rela menghormati dan berlandung pada Amerika, sebab kekuatan-kekuatan lain pun berusaha menguasai ASEAN dan belum tentu kekuatan-kekuatan tersebut seperti misalnya Cina, sebaik Amerika selama ini.

Institusi ASEAN sendiri lebih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal Anglo-Saxon dibandingkan tradisi misalnya konfuisme atau bushido. Dari aspek demokrasi, perdagangan bebas (AFTA) dan dialog-dialog yang berlangsung, ASEAN mempunyai kedekatan dengan nilai-nilai universal hegemoni Amerika. jadi ini tidak hanya terkait soft power dan hard power Amerika, tetapi pengaruh diskursif dan hegemoni Amerika terhadap ASEAN yang sesungguhnya sangat complex. Hal ini terbangun dari sejak awal hubungan negara-negara ASEAN terjalin dengan Amerika.

F. Pemikiran Katsumata

Pemikiran Katsumata lebih kompleks dan menarik, sebab pemakaian pendekatan eklektik menampilkan ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai forum yang signifikan. Padahal pemikir realis dan liberalis melihatnya tidak berguna, sebab tidak membuahkan kesepakatan yang memaksa dan yang menggerakkan kebijakan ASEAN tetap negara-negara yang kuat (powerful). Dengan kata lain, prinsip kedaulatan di ASEAN membuat setiap negara sebenarnya tetap jalan sendiri-sendiri.

Pendekatan eklektik ini berusaha dipakai Katsumata dengan meyakinkan akademisi Hubungan Internasional bahwa ARF adalah proses panjang suatu forum normatif. Sifat normatif

ini berguna untuk terus-menerus berdialog (praktik-praktif diskursif) dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan besar di Asia Tenggara untuk menetralkan ketegangan-ketegangan dan mengurangi logika balance of power (BoP). BoP adalah sistem yang efektif mencegah perang, tetapi juga beresiko terjadi perang besar dan sangat sedikit dialog yang dilakukan dalam sistem semacam ini. Rendahnya dialog, maka meningkatkan kecurigaan antar negara di Asia Tenggara.

G. Pemikiran Beeson

Pemikiran Beeson bisa dipetakan dikelompokkan liberal institusionalisme. ASEAN seharusnya menguatkan kembali institusinya, sebab jalinan kerjasama tidaklah sekedar aktivitas normative social, tetapi aktivitas procedural dan memaksa secara legal-formal. Oleh sebab itu, peraturan yang tegas, ketat, dan tertulis dalam cetak biru diperlukan. Dalam penguatan institusi ini, para warga ASEAN tentunya harus mempunyai kemampuan managerial dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Beeson juga selaras dengan akademisi liberal institusionalis lainnya, bahwa ASEAN harus mejadi institusi supranasional agar secara struktural menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Kasus Laut Cina Selatan adalah fenomena yang Beeson pahami sebagai tantangan ASEAN yang belum terselesaikan, khususnya di ARF. Memang dalam kasus-kasus tertentu, ASEAN belum seutuhnya mengandalkan ARF sebagaimana Katsumata argumenkan. Isu-isu strategis dan sensitive dan melibatkan banyak negara tampaknya masih sulit bagi ARF menanganinya. Di samping itu ARF adalah forum yang membutuhkan rangkaian dialog yang terus menerus. Jadi kasus Laut Cina Selatan memang perlu diperbicangkan terus menerus agar menjadi suatu diskursif positif bagi yang berkonflik.

Dalam ARF inilah konflik diusahakan dikurangi tensinya.

Bagi Beeson, konflik ini menampilkan peran strategis Amerika dan Cina yang cukup kuat di Asia Tenggara. ASEAN berusaha dipaksa mendukung salah satu dari mereka. Tentunya, ASEAN mempunyai kedekatan lebih ke Amerika berdasarkan riwayat hubungannya selama ini. Hal ini selaras dengan apa yang dipahami oleh Beyer tentang peran hegemoni Amerika di ASEAN.

H. Pemikiran Jones dan Smith

Sebaliknya, pemikiran Jones dan Smith justru percaya akan pendekatan realisme, sebab asumsi-asumsi dasarnya cukup kuat tampil dalam percaturan politik ASEAN. Dengan mengkritik pendekatan konstruktivisme, mereka berargumen bahwa kasus ekonomi-politik internasional, krisis Asia Tenggara 97/98 adalah lemahnya power ASEAN. Tampaknya, negara maju tidak mau tertandingi powernya oleh macan-macan Asia, sehingga secara ekonomi-politik, Asia Tenggara diguncang. Negara-negara Asia Tenggara kocak-kacir mencari dana talangan, sehingga beberapa yang tak tertolong jatuh kepada IMF dan menerima berbagai macam 'perintah' berupa program-program dari IMF.

Jones dan Smith melihat bahwa peran Amerika semakin menguat di Asia Tenggara, sebab kekuatan pasarnya dapat menyelamatkan perekonomian dunia Barat. Power dolar dan militer Amerika masih menjadi imaji masyarakat internasional yang menakutkan, sehingga hegemoni Amerika tetap diterima. Selama ini, hegemoni kekuatan Amerika di Asia Tenggara masih cukup disegani dibandingkan Cina dan Jepang yang belum teruji memberi keuntungan bagi kepentingan nasional ASEAN.

Peta dan Posisi Masing-Masing Pemikiran

Pemikiran Termsak dipetakan bersama Beeson yang beraliran liberal institusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari argumennya tentang penguatan institusi dan fungsi ASEAN, penguatan struktur ASEAN, demokratisasi dalam tubuh ASEAN, dan kerjasama antar anggota ASEAN dalam penegakkan hak asasi manusia (HAM).

Beeson memang tidak sedalam pemaparan Termsak. Termsak sampai pada pemaparan perbedaan sistem politik negara-negara ASEAN seperti kerajaan di Brunei dan Malaysia, Laos dan Vietnam yang cenderung komunisme, dan yang lainnya. Perbedaan ini menjadi kurang signifikan, ketika mereka menjadi bagian dari ASEAN, karena sistem ASEAN adalah demokrasi. Nilai-nilai liberal adalah bagian dari proses terwujudnya demokratisasi ASEAN. Nilai-nilai liberal yang dibawa oleh para pemikir Eropa klasik misalnya John Stuart Mill, John Locke, dan Adam Smith adalah suatu keharusan agar institusionalisme ASEAN menjadi kuat. Penerapan nilai-nilai liberal yang universal di ASEAN inilah yang menjadi tantangan bagi semua anggota ASEAN.

Beeson juga tidak menyinggung isu HAM seperti Termsak. Penguatan institusi menjadi penting tidak hanya untuk urusan ekonomi dan politik, tetapi isu-isu nontradisional seperti HAM. Menurut Termsak, karena penerapan demokratisasi ASEAN masih lemah, maka HAM yang ditopang dari universalisasi nilai-nilai liberal menjadi absurd. HAM ASEAN hanya sekedar perbincangan dalam forum ASEAN tanpa menghasilkankesepakatan yang mengikat, sebaliknya diserahkan kepada anggota ASEAN masing-masing. Dengan demikian, setiap anggota ASEAN secara relative dan subjektif mereka menerapkan penegakkan HAM. Hal ini menjadikan isu HAM di Asia Tenggara memanas dan dipahami negara-negara Barat seperti Eropa Barat, Amerika, Inggris, Australia dan sejenisnya

sebagai pelanggaran HAM.

ASEAN sebagai institusi yang seharusnya menguat, justru masih ambivalen dalam penerapan nilai-nilainya, antara pembentuk nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai liberal. Padahal, nilai menjadi sangat penting sebagai norma, lalu beranjak ke prosedur dan aturan main institusi. Jadi forum semacam Governmental Commission on Human Right di ASEAN justru hanya sebagai legitimasi setiap anggota ASEAN untuk menerapkan HAM sekehendak mereka.

Konsekwensi lemahnya nilai-nilai liberal dan proses demokratisasi di ASEAN menjadikan realitas politik dalam tubuh ASEAN melemahkan institusi dan meningkatkan eskalasi konflik antar anggotanya. ASEAN way sebagai nilai ternyata absurd, artinya nilai-nilai ASEAN yang tengah dibentuk dan diyakini sebagai sesuatu yang unik dari konsensus anggotanya belum terlihat, di sisi lainnya, nilai-nilai liberal dalam ASEAN way pun dijalankan secara partikular. Misalnya dalam konteks HAM yang secara tegas belum menerapkan nilai-nilai liberal. Jadi ASEAN way yang sifatnya informal dan hanya berisi perbincangan normative belum sampai ke tahap yang tegas dan jelas memaksa anggotanya menjalankan kesepakatan bersama.

ASEAN Charter yang seharusnya memberikan aturan yang mengikat sebagai suatu pembangunan institusi, tetapi sama saja dengan ASEAN way yang hanya berisi percakapan informal dan ambivalensi prinsip antara kedaulatan dengan regionalism institusionalisme. Jadi, sampai ASEAN charter dan ASEAN way, ASEAN masih sebatas institusi sosial informal, tetapi memberi jalan untuk penyelesaian ekonomi dan politik. Hal ini berbeda dengan Uni Eropa yang lebih pada institusi ekonomi, lalu dilegalkan menjadi institusi ekonomi dan politik, tetapi aspek sosialnya justru

mengikutinya.

ASEAN Charter dan ASEAN way memang bagian konstruktif institusionalisasi ASEAN sejak adanya ARF. Sesungguhnya, jika merujuk pada pemikiran Katsumata, adanya ASEAN Charter dan ASEAN way merupakan langkah yang sangat hati-hati, positif, dan tepat dalam membangun identitas normatif dan sosial antar anggota ASEAN. Ditambah lagi dengan adanya hegemonic governance yang menurut Beyer sudah melampaui soft power dan hard power, tetapi diskursif power, maka institusi ASEAN tetap bermain dalam tensi kekawatn-kekuatan besar di kawasannya. Memainkan peran di sekitar negara-negara besar adalah bagian dari power diskursif ASEAN agar memperoleh keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian di kawsannya.

Ditambah lagi adanya pembangunan institusi ASEAN juga terlihat pada empat Deputy Sekretaris Jenderal (Deputy Secretary-General/DSGs), Duta Besar ASEAN, sekretariat ASEAN dan beberapa departemen tambahan: “three community pillars” dan “community affair” serta “corporatae affairs”. Semua itu adalah pilar positif bagi keberlangsungan institusi ASEAN yang berusaha membedakan dirinya dengan Uni Eropa. Jangan sampai para akademisi menyederhanakan dan mengambil pendekatan yang simplistic seperti lagi-lagi menggunakan realism, karena dianggap mudah melihat indikator-indikatornya.

Sebagai akademisi senior LIPI, CPF Luhulima tetap konsisten dengan pandangan realismenya. Cukup dimaklumi bahwa akademisi senior semakin yakin dengan apa yang selama ini dialami dan secara praktis memang ikut serta dalam proses berjalannya ASEAN. Dalam pemaparannya di aspek ekonomi, politik, dan keamanan, Luhulima terlihat menggunakan perspektif realism klasik. Perspektif realisme klasik berasumsi bahwa

negara sebagai aktor utama dan tunggal di dunia internasional, kerjasama murni sulit terwujud, konflik-konflik selalu ada dalam hubungan antar negara dan kekuasaan adalah di atas segalanya. Selain itu, pemaparannya yang sangat kuat dengan pendekatan sejarahnya menandakangaya klasik realismenya.

Kuatnya pemaparan sejarah justru menampilkan pengalamannya yang dalam akan analisis ekonomi, politik, dan keamanan dan problematikanya. Di bidang ekonomi, Luhulima cenderung pada ekspansi kerjasama yang lebih luas di luar ASEAN. Dia sadar betul bahwa globalisasi tidak dapat lagi dibendung, sehingga ASEAN harus ‘berselancar’ di era tersebut. Menurutnya Luhulima, ASEAN harus terbuka dan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara besar, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia. Keterbukaan ini tidak dilihat dari pendekatan ekonomi liberal saja, tetapi selalu mengedepankan pendekatan realisme-kekuasaan. Oleh sebab itu, aspek ekonomi ASEAN tetap harus mengedepankan politik-kekuasaan sebagai panglima.

Di dalam aspek politik, Luhulima hanya menekankan pemikiran normatif tentang penyelesaian perselisihan secara damai, pentingnya kedaulatan, proses pengambilan keputusan yang bulat dan penyelesaian konflik di luar ASEAN seperti masalah Laut Cina Selatan. Secara politik dia tidak memaparkan kepemimpinan ASEAN pasca Soeharto. Soeharto adalah figur penting ASEAN yang sampai sekarang belum tergantikan dalam menyatukan ASEAN sebagai kekuatan kawasan.

Aspek keamanan ini menunjukkan bahwa realis sangat penting sebagai pendekatan di sini. Luhulima menggambarkan pentingnya keamanan Asia Tenggara seperti terorisme, kejahatan

transnasional, dan isu perbatasan serta solusi dalam kerangka diplomasi preventif. Negara-negara ASEAN harus mempunyai kekuasaan untuk menggerakkan institusi tersebut dalam menangani isu keamanan itu.

Lain halnya, pemikiran teknokrat Dewi Fortuna Anwar yang mempunyai persamaan dengan Beeson dan Termsak, yakni percaya akan perspektif liberal institusional. Hal yang berbeda tipis antara Dewi dan Termsak, tetapi sepemikiran dengan Beeson adalah, Dewi dan Beeson secara tegas menyebut ASEAN sebagai institusi yang masih kurang matang. Oleh karena itu, ASEAN harus mencontoh sistem struktur supranasional Uni Eropa. Dewi berusaha mendobrak kegamangan Luhulima tentang hubungan antar negara yang masih berat pada kedaulatan, tetapi mementingkan regionalisme juga. Dewi menginginkan ASEAN menjadi supranasional, sehingga dia mempunyai kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Tentunya, perspektif Termsak tentang pentingnya proses demokrasi, nilai-nilai liberalisme, dan penegakkan HAM akan mudah dijalankan apabila sistem supranasional sudah diterapkan di ASEAN.

Sama halnya David dan Smith serta Luhulima, setelah Watherbee memaparkan perspektif realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk menunjukkan bahwa realisme masih yang paling relevan. Watherbee memutuskan perspektif realisme sebagai pandangan Hubungan Internasional yang paling tepat dalam melihat ASEAN. Dalam dinamika global dan lokal, ASEAN adalah kekuatan diantara negara-negara besar. Jadi ASEAN sendiri perlu kuat menghadapi negara-negara besar dalam dinamika politik dunia.

Studi Hubungan Internasional Asia Tenggara sangat mengutamakan aktor negara-bangsa dan kepentingan nasional, jadi perspektif realis adalah pandangan yang memang tepat dalam menjelaskan

ASEAN. Perspektif ini mengutamakan kemampuan suatu negara dalam mempengaruhi negara lain dalam pengambilan keputusan di ASEAN. Dalam ASEAN tidak ada kekuasaan supranasional yang menentukan pengambilan kebijakan. Semua keputusan ditentukan oleh kepentingan vital negara masing-masing yang akan menentukan level konflik, kerjasama, dan kompetisi. Jadi misalnya masalah asap dari Indonesia, pasir di Singapura, illegal logging Indonesia-malaysia, ditentukan oleh kepentingan nasional masing-masing, tanpa dibawa penyelesaiannya di forum ASEAN.

Watherbee sangat percaya akan perimbangan kekuatan di dalam ASEAN dan juga ASEAN dikaitkan dengan kekuatan lain seperti Cina dan Amerika. ASEAN sendiri berhasil memaksa kekuatan-kekuatan dalam sistem internasional lainnya seperti Uni Eropa, India, Jepang, Australia, Korea Selatan, untuk mendekat ke Asia Tenggara. Jadi karya Watherbee ini memang menggunakan perspektif realisme, tepatnya neo-realisme, sama halnya dengan David dan Smith dan berbeda dengan Luhulima yang cenderung klasik. Dia menggunakan neo-realisme untuk melihat ASEAN dalam menangani berbagai macam tantangan ekonomi politik dan keamanan-ancaman dari manapun juga (dari ancaman negara-negara kuat sampai dengan isu-isu non tradisional seperti isu lingkungan, HAM dan demokrasi, kriminal transnasional, dll).

Simpulan

Dengan membaca berbagai hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini sesungguhnya menemukan beberapa pemikiran dan substansi tema kajian. Pertama, ulasan yang disajikan oleh Cornelia Beyer. Beyer lebih dapat dikelompokkan dalam perspektif critical realism dengan aspek pembahasan pada hegemonic governance.

Selanjutnya muncul Hino Katsumata melalui pendekatan “eklektik: konstruktivisme dan rasionalisme”. Pokok pembahasan Katsumata pada signifikansi ARF dalam perdamaian/keamanan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah Mark Beeson. Beeson lebih dekat pada perspektif liberal institusional dengan pokok bahasannya pada penguatan institusi.

Kemudian yang keempat muncul David & Smith dengan pendekatan neo realisme. David & Smith memandang akan arti pentingnya sistem internasional yang stabil, termasuk balance of power atau keseimbangan kekuatan, dan banyak memberikan kritikan terhadap pandangan konstruktivisme.

Temuan selanjutnya adalah pemikiran Termsak Chalernpalanupap. Termsak lebih cenderung beraliran liberal institusionalis. Titik tekan pembahasannya pada penguatan institusi agar demokrasi, HAM dapat berjalan dengan baik. Kemudian, CPF. Luhulima, yang lebih cenderung beraliran klasik. Luhulima banyak mendalami mengenai pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi globalisasi.

Munculnya Dewi Fortuna Anwar sebagai salah satu pemikir ASEAN tentu bukan sesuatu yang baru. Dewi lebih banyak menggunakan pendekatan liberal dengan konsentrasi pembahasan pada 3 (tiga) pilar ASEAN.

Terakhir, kemunculan Donald E. Weatherbee yang banyak menggunakan pendekatan neo-realisme. Menurutnya, ASEAN lebih penting menitikberatkan BoP (balance of power) ketimbang maksimalisasi peran ARF.

Daftar Pustaka

• Buku

Amineh, M. Parvizi (ed). 2010. *State, Society and International Relations in Asia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Beeson, Mark. 2009. *Institutions of the Asia Pasific: ASEAN, APEC, and Benyond*. London and New York. Routledge.

Beyer, Ana Cornelia, 2010. *Counter Terrorism and International Power Relations*. London and New York: I. B Tauris Publishers

Chawala, S., Gurtov, Melvin., and Marsar, A.G., (ed). 1974. *Southeast Asia Under the New Balance of Power*. New York: Praeger Publishers.

David, John and Smith MLR. 2006. *ASEAN and EastAsian International Relations: Regional Delutions*. Cheltenham: Erdward Elgar.

Eminers, Ralf. 2003. *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*, New York: Routledge.

Hiro Katsumata. 2009. *ASEAN's Cooperative Security Enterprise, Norms and Interests In The ASEAN Regional Forum*. New York: Palgrave Macmillan.

Howarth, David. 2000. *Discourse*. Philadephia. Open University Press

McCloud, Donald G., 1995. *Southeast Asia: Tradition and Modernity in the Contemporary World*, Boulder: Westview Press

Mills, Sara. 1997. *Discourse*. London: Routledge.

Weatherbee. Donald E. 2009. *International Relations in Southeast Asia, The Struggle For Autonomy*, (2nd ed), United Kingdom; Rowman & Littlefield Publishers.

• Jurnal

Abuza, Zachry. *Funding Terrorism in Southeast Asia (The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiya)*, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, Number 2, August 2003.

• Artikel Dalam Buku

Buzan, Barry. "The Southeast Asian Security Complex", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 10/1 (June 1988)

Bristow, Damon. The Five Power Defense Arrangements (Southeast Asia's Unknown Regional Security Organization), *Contemporary Southeast Asia* 27, No. 1 (2005)

De Castro, Renato Cruz. Addressing International Terrorism in Southeast Asia: Terrorism in Southeast Asia, *Contemporary Southeast Asia* 26, No 2 (2004)

Heller, Dominic. The Relevance of the ASEAN Regional Forum (ARF) for Regional Security in the Asia-Pacific, *Contemporary Southeast Asia* 27, No. 1 (2005)

Jones, Michael E., Forging an ASEAN Identity: The Challenge to Construct a Shared Destiny, *Contemporary Southeast Asia* 26, No. 1 (2004)

Limaye, Satu., Minding the Gaps: The Bush Administration and U.S.-Southeast Asia Relations, *Contemporary Southeast Asia* 26, No. 1 (2004)

Clifford, Geertz, C. 1973. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture", in *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. NY: Basic Books.

Sheldom Simon, Realism and Regionalism in Southeast Asia: The ARF and the war on Terror, dalam Joseph Chinyong Liow and Ralf Emmers (ed), *Order and Security in Southeast Asia*, Essays in memory of Michael Leifer, New York: Routledge, 2006.

Yuen Foong Khong, "ASEAN and the Southeast Asia Security Complex", dalam *Regional Orders: Building Security in a New World*, diedit oleh David A. Lake dan Patrick M. Morgan (US: The Pennsylvania State, 1997).

Paper Workshop

Prasetyono, Edy, "NTS Challenges and Policy Responses in Indonesia", a paper presented at the Inaugural Meeting for the Consortium on Non-Traditional Security Studies in Asia (NTS-Asia), Singapore 8-9 January 2007.

